

Kasus Denny Naik ke Penyidikan

JAKARTA – Polri serius mengusut kasus dugaan korupsi *payment gateway* di Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham). Bahkan saat ini status kasus yang diduga menyeret nama mantan Wamenkumham Denny Indrayana itu sudah naik dari penyelidikan ke penyidikan.

"Penyidikan itu untuk menemukan siapa tersangkanya. Penyidik akan menetapkan tersangka berdasarkan dua atau lebih alat bukti yang ditemukan," ujar Kepala Divisi Humas Polri Irjen Pol Ronny F Sompie saat dihubungi kemarin.

Menurut Ronny, meski disetiap laporan tercantum pihak terlapor, dari proses penyelidikan dan penyidikan belum tentu terlapor ditetapkan menjadi tersangka. "Kalaupun sudah ada terlapor, belum tentu dia jadi tersangka. Proses penyidikan harus ditetapkan, tujuannya mengumpulkan alat bukti dan menemukan siapa tersangkanya," paparnya.

Ronny menyebut pihak terlapor tidak melulu dijadikan tersangka karena pemeriksaan bertujuan mengumpulkan alat bukti yang kuat. Ketetapan itu sudah ada di dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), tidak ada pe-



DENNY INDRAYANA
Mantan Wamenkumham

ngaturan hukum yang langsung menersangkakan saksi. "Kalaupun sudah ada terlapor belum tentu dia tersangka, tapi proses penyidikan harus ditetapkan, tujuannya mengumpulkan alat bukti dan menemukan siapa tersangkanya," urainya.

Belum Tentu Tersangka

Adapun Wakapolri Komjen Pol Badrodin Haiti meminta Denny Indrayana untuk hadir memenuhi pemanggilan penyidik Bareskrim Polri atas peme-

riksaan perkara dugaan tindak pidana korupsi *payment gateway*. Badrodin mengharapkan Denny tidak panik menghadapi proses hukum. "Jangan dianggap kriminalisasi. Ini adalah temuan BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) dan belum tentu juga Pak Denny Indrayana (tersangkanya). Hadapi dulu, kok malah ke sana-kemari. Bisa saja dia jadi terlapor, tapi belum (tentu) tersangka," tandasnya.

Badrodin mengatakan, proses penyelidikan kasus ini merupakan hasil laporan BPK atas temuan yang mereka peroleh di lapangan. Polri dalam koridor berkewajiban sebagai pihak penyidik untuk mencari ada atau tidaknya dugaan tindak pidana korupsi. Penyidik Bareskrim, menurutnya, saat ini telah berupaya melakukan pemeriksaan perihal perkara layanan jasa penerbitan paspor tersebut. Salah satunya dengan mengembangkan pemeriksaan kepada saksi-saksi untuk menemukan aktor utama yang bisa dtersangkakan. "Itu nanti untuk siapa tersangkanya, kita juga belum tahu. Makanya diperiksa sebagai saksi untuk dimintai keterangan, bukan sebagai tersangka. Kok malah dituding Polri kriminalisasi," tandasnya.